

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK

Binti Kolisotin

*Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kadiri, Indonesia*

Email Korespondensi: maeka85@gmail.com

Submitted: 24-02-2024 | Accepted: 22-05-2025 | Published: 23-05-2025

<p>Kata Kunci: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan Publik; Kartu Kredit; Pemerintah Daerah</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan merujuk pada model implementasi menurut Edward III yang peneliti gunakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, antara lain bagaimana proses komunikasi dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik. Di mana pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai langkah, seperti rapat koordinasi dan bimbingan teknis, untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait. Dengan dukungan pimpinan dan respons positif dari pegawai, prospek keberhasilan implementasi KKPD di daerah ini terlihat menjanjikan, namun masih ditemukan beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program ini, antara lain masalah komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, disposisi pegawai yang belum sepenuhnya mendukung perubahan ini menjadi tantangan tersendiri, serta prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks memperlambat proses pengajuan dan pencairan dana, serta kurangnya koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat antusiasme terhadap program KKPD, langkah-langkah strategis dalam meningkatkan komunikasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penyederhanaan birokrasi sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.</p>
<p>Keywords: Public Policy; Public Policy Implementation; Credit Card; Local Government</p>	<p>Abstract</p> <p><i>This study aims to describe and analyze the implementation of the Local Government Credit Card (KKPD) in Nganjuk Regency. By using qualitative research methods and referring to the implementation model according to Edward III that researchers use, there are four factors that influence the successful implementation of a policy, including how the communication process is carried out, resource capabilities, disposition processes, and existing bureaucratic structures. The results showed that the implementation of the KKPD in Nganjuk District was quite good. Where the local government</i></p>

has implemented various steps, such as coordination meetings and technical guidance, to convey information to related parties. With the support of the leadership and the positive response of employees, the prospects for successful implementation of the MPA in this area look promising, but there are still some significant obstacles affecting the smooth implementation of this program, including communication problems, limited human resources, the disposition of employees who do not fully support this change is a challenge, as well as long and complex bureaucratic procedures that slow down the process of applying for and disbursing funds, and a lack of inter-OPD coordination that needs to be improved to increase efficiency. Overall, despite enthusiasm for the KKPD program, strategic measures to improve communication, human resource training, and bureaucratic simplification are needed to overcome these obstacles.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, keterlibatan seluruh elemen organisasi, terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, memegang peranan penting (Wijaya & Fauji, 2021). SDM merupakan aktor utama yang menggerakkan setiap aktivitas organisasi karena pada dasarnya manusia berperan sebagai perancang, pelaksana, sekaligus penentu tercapainya target yang telah ditetapkan (Pratama, 2019). Oleh karena itu, SDM dipandang sebagai faktor kunci keberhasilan organisasi dan dianggap sebagai aset yang sangat berharga (Herdilah et al., 2023).

Setiap organisasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintahan, memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkontribusi tinggi demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja sendiri menggambarkan sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan mampu mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi (Basri & Saman, 2020). Penelitian mengenai kinerja pegawai di sektor pemerintahan menjadi menarik, mengingat saat ini kinerja organisasi pemerintah sering menjadi sorotan publik, terutama terkait maraknya kasus ketidakdisiplinan pegawai yang muncul di lingkungan pemerintahan.

Kinerja pegawai dapat dievaluasi melalui indikator kinerja yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kerja individu (Deni et al., 2018). Keberadaan indikator ini memungkinkan organisasi untuk menilai sejauh mana tingkat kinerja pegawai, sehingga dapat memberikan umpan balik, mendorong perbaikan, dan mendukung pengambilan keputusan strategis demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta

memiliki daya saing tinggi. Tanpa indikator kinerja yang jelas, organisasi akan kesulitan menilai keberhasilan maupun kegagalan program yang dijalankan (Iptian et al., 2020).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan serta aset daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas utamanya mencakup pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset, termasuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selama ini, kinerja organisasi BPKAD dinilai baik, terbukti dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut pada periode 2017–2022 (jatim.bpk.go.id). Selain itu, BPKAD juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem yang diharapkan mampu memperkuat kinerja pegawai. Faktor-faktor inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Nganjuk dituntut untuk memiliki responsivitas, keandalan, dan potensi tinggi di bidang tugasnya, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, mereka diharapkan memiliki mentalitas yang baik, wibawa, ketangguhan, efektivitas, integritas, serta kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai pelayan negara dan masyarakat, sehingga mampu menghadapi tantangan dan hambatan dengan mengubahnya menjadi peluang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Penilaian terhadap kinerja PNS telah mengalami sejumlah perubahan signifikan, dimulai dari penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, hingga yang terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja PNS. Kedua regulasi terakhir ini memiliki perbedaan mendasar baik dari sisi substansi maupun pelaksanaannya. Penilaian kinerja PNS kini dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja di tingkat individu maupun organisasi, dengan mempertimbangkan target, capaian, hasil, manfaat yang diperoleh, serta

perilaku kerja. Proses penilaian dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dalam hal substansi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 memiliki perbedaan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sasaran kinerja sebagai dasar pencapaian target (Mashuri et al., 2020) Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indikator penilaian kinerja berdasarkan ketentuan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan paparan permasalahan dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kinerja pegawai pada BPKAD Kabupaten Nganjuk dengan Judul “implementasi kebijakan kartu kredit pemerintah daerah di kabupaten nganjuk

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian (Sugiono, 2016).

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini berada di Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi didasarkan pada Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa Kabupaten Nganjuk tengah mempersiapkan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang akan diuji coba pada 3 (tiga) OPD yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, BPKAD dan Bappeda Kabupaten Nganjuk.

Fokus pertama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan Teori (EDWARD III, 1980) antara lain bagaimana proses komunikasi dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Kedua, adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan KKPD di Kabupaten Nganjuk.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban wawancara kepada informan dan hasil pengamatan peneliti yang menjadi informasi atas Implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk. Sumber data sekunder penelitian ini berupa jurnal, dokumen, laporan, artikel yang terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Sebagai upaya untuk mendapatkan data mengenai implementasi KKPD sesuai dengan fokus penelitian, maka informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan dari para informan berikut ini:

Tabel 1
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1	Bapak Drs. Nur Solekan, M.Si	Sekretaris Daerah
2	Bapak Drs. Mokhamad Yasin, M.Si	Inspektur Daerah
3	Ibu Kartimah SE., M.Si,	Kepala BPKAD
4	Bapak Drs. Adam Muharto, M.Si	Pemimpin Cabang Bank Jatim Nganjuk
5	Bapak Wardoyo, SH., M.H	Kepala Bidang Perbendaharaan
6	Ibu Ryn January	Sales & Marketing Card Officer Bank Mandiri Area Kediri
7	Ibu Erna	Pemilik UD. Virma Computer selaku rekanan/pihak ketiga

Sumber : Peneliti, 2025

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode yang penggunaannya akan disesuaikan dengan jenis dan sifat data yang diperlukan, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik tersebut adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell & Poth, 2016).

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif dari (Sugiyono, 2016) karena lebih mudah dipahami dan sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Model analisis data menggunakan 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengadopsi sistem Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai salah satu instrumen pembayaran yang diharapkan mampu mempercepat proses transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meningkatkan akuntabilitas dalam belanja operasional pemerintahan. Implementasi KKPD merupakan langkah strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam

mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. Namun, seperti halnya penerapan kebijakan baru lainnya, pelaksanaan KKPD di Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan implementasi KKPD sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi KKPD, di mana pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyediaan panduan digital. Namun, masih terdapat hambatan dalam pemahaman teknis, terutama bagi pihak ketiga. Untuk itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dengan metode yang lebih praktis, seperti simulasi langsung dan pendampingan lapangan, guna memastikan pemahaman dan penerapan KKPD berjalan lebih efektif.

2. Sumber Daya

Implementasi KKPD didukung oleh tiga aspek utama sumber daya: manusia, finansial, dan teknologi. Pelatihan bagi aparatur telah dilakukan, namun pemahaman mengenai regulasi dan aspek teknis masih perlu diperkuat. Dari segi finansial, anggaran khusus telah dialokasikan untuk mendukung infrastruktur dan sosialisasi, sementara dari sisi teknologi, sistem pembayaran digital telah diintegrasikan. Kolaborasi dengan Bank Jatim menjadi faktor pendukung utama, meskipun adaptasi terhadap teknologi baru masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

3. Disposisi

Dukungan dan komitmen pimpinan daerah, terutama Bupati, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan KKPD. Transparansi dan akuntabilitas ditekankan melalui pengawasan ketat oleh Inspektorat dan BPKAD. Meskipun awalnya ada keraguan di kalangan pegawai, sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan telah meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan KKPD. Dengan dukungan pimpinan yang kuat dan respons positif dari pegawai, implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk memiliki prospek yang menjanjikan.

4. Struktur Birokrasi

Secara umum, struktur birokrasi di Kabupaten Nganjuk mendukung pelaksanaan KKPD, tetapi masih menghadapi kendala dalam kompleksitas prosedur dan koordinasi antar-OPD. Panjangnya proses birokrasi dalam pengelolaan anggaran dan pencairan dana menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah tengah berupaya menyederhanakan prosedur untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi transparansi. Penyesuaian alur koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar implementasi KKPD dapat berjalan lebih cepat dan responsif.

Dalam proses implementasi kebijakan baru, tantangan dan hambatan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Nganjuk. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, berbagai kendala teknis maupun non-teknis masih menjadi penghalang bagi optimalisasi pelaksanaannya.

Dari segi komunikasi, sosialisasi mengenai KKPD masih belum optimal, baik kepada pegawai maupun masyarakat, sehingga pemahaman terhadap manfaat dan tata cara penggunaan masih terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian teknologi digital menjadi tantangan, terutama dalam audit digital dan pengelolaan kartu kredit. Hal ini diperparah oleh infrastruktur teknologi yang belum merata di beberapa wilayah. Di sisi disposisi, resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai memperlambat adaptasi terhadap sistem baru.

Struktur birokrasi yang kompleks dan prosedur administrasi yang panjang juga menjadi hambatan signifikan. Proses pengajuan dan pencairan dana melalui KKPD memerlukan penyederhanaan untuk meningkatkan efisiensi. Kurangnya koordinasi antar-OPD dan antara pemerintah dengan pihak perbankan turut memperlambat implementasi program ini. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan pelatihan teknologi, perbaikan komunikasi, dan reformasi prosedural untuk mendukung keberhasilan implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk.

Upaya mengatasi hambatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Nganjuk mencakup penyesuaian prosedur administrasi, penguatan pengawasan, dan penyederhanaan birokrasi. Pemerintah daerah telah mengintegrasikan KKPD ke dalam prosedur operasional di berbagai OPD, menyederhanakan proses pengajuan belanja, dan meningkatkan akurasi pelaporan

keuangan. Selain itu, pengawasan diperkuat melalui audit berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penyesuaian juga dilakukan dalam perencanaan anggaran agar penggunaan KKPD dapat diakomodasi secara efektif, didukung oleh koordinasi lintas OPD yang lebih baik.

Meski belum ada perubahan besar dalam struktur organisasi, beberapa pegawai diberikan tanggung jawab tambahan untuk menangani KKPD secara khusus. Di sisi perbankan, penyederhanaan prosedur aplikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mempercepat persetujuan dan transaksi. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta kerumitan birokrasi, sehingga implementasi KKPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, untuk melihat implementasi KKPD Kabupaten Nganjuk telah terimplementasi dengan baik atau belum dan hambatan serta upaya dalam menghadapi hambatan dalam implementasinya, ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Hasil Pembahasan

No.	Indikator	Ringkasan Pembahasan
1	Komunikasi	Secara keseluruhan, komunikasi mengenai implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk telah terimplikasi dengan baik, tetapi perlu ada peningkatan berkelanjutan dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan dukungan teknis untuk mengatasi kendala yang ada.
2	Sumber Daya	Secara keseluruhan, kesiapan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan program KKPD sudah cukup baik, tetapi masih perlu diperkuat. Implementasi KKPD yang efektif dan efisien sangat bergantung pada peningkatan kompetensi SDM, dukungan infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, diharapkan program KKPD dapat dijalankan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
3	Disposisi	Secara keseluruhan, disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk sangat mendukung. Dukungan kuat dari pimpinan daerah,

		<p>pengawasan yang baik, dan sikap positif pegawai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Meskipun terdapat tantangan di awal pelaksanaan, upaya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan telah meningkatkan kepercayaan dan kemampuan pegawai dalam menggunakan KKPD, yang pada akhirnya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran daerah.</p>
4	Struktur Birokrasi	<p>Meskipun struktur birokrasi di Kabupaten Nganjuk mendukung implementasi KKPD, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait kompleksitas prosedur dan koordinasi antar sektor. Penyederhanaan proses dan penyesuaian dalam prosedur administrasi dan keuangan, serta penguatan koordinasi antar OPD, menjadi kunci penting untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan KKPD. Melalui upaya kolaboratif dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan implementasi KKPD dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.</p>
5	Hambatan	<p>Sosialisasi belum optimal sehingga pemahaman pegawai dan masyarakat terhadap manfaat serta tata cara penggunaan masih terbatas. Keterbatasan SDM dengan keahlian teknologi digital dan infrastruktur yang belum merata menjadi kendala. Prosedur birokrasi yang panjang memperlambat proses, ditambah kurangnya koordinasi antar-OPD dan dengan pihak perbankan.</p>
6	Upaya Mengatasi Hambatan	<p>Penyesuaian prosedur administrasi melalui integrasi KKPD ke prosedur operasional OPD, penyederhanaan proses pengajuan belanja, dan peningkatan akurasi pelaporan keuangan. Pengawasan diperkuat dengan audit berkala, serta penyesuaian dalam perencanaan anggaran untuk mendukung penggunaan KKPD. Koordinasi lintas OPD ditingkatkan, penyederhanaan prosedur aplikasi dan kolaborasi dilakukan bersama pihak perbankan.</p>

Sumber : Peneliti, 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Nganjuk telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi elemen utama yang memengaruhi efektivitas implementasi KKPD. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, namun masih ditemukan kendala dalam pemahaman aspek teknis oleh pegawai dan pihak ketiga. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami sistem digital dan pengelolaan kartu kredit masih perlu ditingkatkan agar implementasi KKPD dapat berjalan lebih optimal. Dukungan pimpinan daerah juga berperan penting dalam memastikan keberhasilan program ini, terutama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, prosedur birokrasi yang panjang dan koordinasi antar-OPD yang kurang efektif masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar sistem ini dapat berjalan lebih efisien.

Sebagai upaya perbaikan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti mengintegrasikan KKPD dengan sistem keuangan daerah secara digital, menyederhanakan prosedur pengajuan dan pelaporan keuangan, serta memperkuat mekanisme pengawasan melalui audit berkala. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis serta penguatan koordinasi dengan pihak perbankan juga menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas implementasi KKPD. Ke depan, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem ini agar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan KKPD dapat menjadi instrumen keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nganjuk.

B. Saran

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Nganjuk, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan KKPD dengan sistem keuangan daerah secara digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi. Prosedur pengajuan belanja juga perlu disederhanakan dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas,

disertai panduan teknis serta pelatihan bagi pegawai. Selain itu, audit berkala harus diperkuat dengan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Perencanaan anggaran yang lebih fleksibel diperlukan agar KKPD dapat dioptimalkan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Forum koordinasi antara OPD dan perbankan juga harus diadakan secara berkala untuk mengatasi kendala teknis. Selain itu, penggunaan metode pembayaran alternatif seperti Mobile Banking dan QRIS dapat diperkenalkan guna meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi transaksi KKPD.

REFERENSI

- Basri, S., & Saman, A. (2020). Kinerja Pegawai Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 4(1), 71.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Deni, M., Bangsawan, A., Mawarni, I., & Afini, V. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan Departemen Mutu Checker dry PT. Aneka Bumi Pratama (ABP) Palembang. *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 53–66.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Herdilah, H., Septiliani, N. A., Septimia, L., Rodiyah, S., & Tadi, T. (2023). Paradigma Baru Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Global. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(1), 60–83.
- Iptian, R., Zamroni, Z., & Efendi, R. (2020). The effect of work discipline and compensation on employee performance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 145–152.
- Mashuri, M., Suwarno, S., & Pramono, T. (2020). Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development. *Mediasosian*, 4(1).
- Pratama, M. R. (2019). Pelayanan Publik Di Daerah Menguak Kesenjangan Pelayanan Dasar Di Era Otonomi Daerah. *Mediasosian*, Vol. 3(1), hal. 27-33.
- Sugiono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. PT. Alfabet.
- Wijaya, D. W. E., & Fauji, D. A. S. (2021). Determinan Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2), 84–94.